

PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA

Supiansyah¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 16120002

²Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 1109127301

³Administrasi Publik, 63201, FISIP, Uniska MAB, 1121028803

ABSTRAK

Supiansyah, NPM. 16.12.0002 **PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA**. Bimbingan Bapak Murdiansyah Herman sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita sebagai Co Pembimbing.

Adapun tujuan pada penelitian ini : Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan Umum Dan Kepegawaian Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pelayanan Umum dan Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras. Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata. Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan. Kemudian pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia. Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal. Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bisa dikuasai sepenuhnya. Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya. Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockfile batu bara. Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga bernilai jual rendah. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga aspek yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam pelayanan publik yaitu Kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas. Ada satu aspek yang belum berjalan baik, yakni Aspek Kualitas Layanan. Padahal aspek tersebut sangat berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada Badan Ketahanan Pangan. Pada program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian faktor tingkat pendidikan serta pengalaman para pegawai Dinas

Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala masih rendah sehingga mempengaruhi dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya

Kata Kunci : Pelayanan, Umum, Kepegawaian

ABSTRACT

Supiansyah, NPM. 16.12.0002 PUBLIC SERVICES AND PERSONNEL IN THE SERVICE OF FOOD SECURITY AND FISHERIES, BARITO KUALA DISTRICT. Guidance Mr Murdiansyah Herman as the Principal Advisor and Ms Fika Fibriyanita as Co Advisor.

The purpose of this study: To determine the implementation of public services and personnel at the Food and Fisheries Security Service, Barito Kuala Regency.

In this study the authors used a qualitative approach, namely to find out or describe the reality of the events under study so that it would be easier for the authors to obtain objective data in order to know and understand Public Services and Personnel at the Food and Fisheries Security Service of Barito Kuala Regency

The results showed that based on the Service Tasks and Functions at the Food and Fisheries Security Service of Barito Kuala Regency, the Food Hope Pattern (PPH) in Barito Kuala Regency is still low because the people's diet is still not diverse, nutritionally balanced and is still dominated by foodstuffs in the form of rice. Handling of food distribution through a program to strengthen community food distribution institutions in the context of price stability is not optimal and adequate, because PLDPM placement is not evenly distributed. Food safety control is not optimal, especially for fresh food commodities in the form of vegetables and fruits. Then the achievement of handling food insecurity is still not optimal due to lack of human resources. Strengthening food storage institutions and expanding food independent villages are still not maximal. The quality of human resources is still low, so fisheries business technology cannot be fully mastered. Weak capital is a classic problem that has not been completely resolved. On the other hand, credit institutions / banks are less interested in extending credit, because fisheries are considered high risk. Land use overlaps that continue to occur, as a result of not optimal spatial planning and control. Degradation of fishery resources due to exploitation that is not environmentally sound or the impact of other activities, for example the existence of oil palm plantations, coal stockfiles. The quality of processed fishery products that have low quality so that they have low selling value. In addition, the research results show that the three aspects used in measuring the performance of the Barito Kuala Regency Food and Fisheries Security Service in public services are service quality, responsiveness, and responsibility. There is one aspect that has not been going well, namely the Aspect of Service Quality. Even though this aspect has a very significant effect on the performance of the Food Security Agency. In programs and services that do not run effectively and efficiently in the implementation of the main tasks and functions of the Food and Fisheries Resilience Service, Barito Kuala Regency. Then the educational level and experience of the staff of the Barito Kuala Regency Food and Fisheries Resilience Service are still low so that they affect their main duties and functions.

Keywords: Service, General, Civil Service

Pendahuluan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat baik dampak dari segi positif maupun negatif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan yang baik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar semua dapat berjalan dengan lancar.

Dari pengertian pelayanan sebagaimana menurut per timbangan pendapat-pendapat para ahli yang telah teruraikan tadi diatas, penulis juga menuangkan pemikiran sendiri terhadap pengertian pelayanan yaitu suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat/instansi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang berupa barang maupun jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No 5 Marabahan.

Tujuan penyusunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 merupakan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan Hasil Observasi yang peneliti lakukan diketahui terdapat beberapa keluhan masyarakat tentang kurang atau tidak hadirnya tenaga staf di kantor, sehingga memperlambat proses pelayanan yang diinginkan masyarakat. Kondisi kemudian ditambah dengan kendala teknis yang sering tidak terduga seperti misalnya pemadaman bergilir yang sedikitnya banyak bergantung pada peralatan yang bersumber dari listrik. Dari kondisi demikian, berdampak pada pelayanan masyarakat yang menjadi lamban dan tidak tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pelayanan Umum dan Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala. Dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. dan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dengan mengumpulkan data-data ataupun informasi untuk mengukur dan memahami Pelayanan Umum dan Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah- masalah yang diteliti yaitu tentang Pelayanan Umum dan Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Khususnya dalam pelayanan administrasi

Sumber data penelitian berasal dari informan yang berada dilokasi penelitian. Sumber data di bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data Primer adalah informan kunci yaitu para pimpinan, pegawai di Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sehingga data yang diambil tidak menyimpang. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau telah diolah dari sumber pertama. Data semacam ini dapat diperoleh melalui sumber-sumber data tertulis seperti profil Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang berhubungan dengan penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut

Observasi dan Wawancara Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini pimpinan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Informan pendukung, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian

Tercapainya sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan juga didukung oleh 2 program pendukung lainnya, yaitu : (1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program : a. Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan (kasus) yang didukung oleh kegiatan : - Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program : b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan : - Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan - Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Perikanan

Pada tahun anggaran 2018 melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dalam meningkatkan produksi perikanan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah : (1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 2 indikator program : a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang didukung kegiatan : - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan - Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Persentase kelompok budidaya penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan, didukung kegiatan : - Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 2 indikator program : a. Jumlah produksi perikanan tangkap yang didukung oleh kegiatan : - Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap b. Persentase kelompok penangkapan penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan yang didukung kegiatan : - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tercapainya sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan juga didukung oleh 2 program pendukung lainnya, yaitu : (3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program : a. Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan (kasus) yang didukung oleh kegiatan : - Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut (4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program : b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan : - Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Hasil Pembahasan

Analisa Kinerja pelayanan Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

1. Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pangan dan Perikanan, sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan mempunyai kinerja pelayanan pelayanan SKPD berupa :

Urusan Pangan

- a. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi produksi, ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat, deteksi dan inventarisasi serta penanggulangan kerawanan pangan dan gizi masyarakat.
- b. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan distribusi dan analisis harga pangan di daerah
- c. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap pola konsumsi dan pengembangan keanekaragaman pangan masyarakat
- d. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap keamanan dan pengembangan pangan pilihan serta pembinaan sistem informasi dan kelembagaan pangan daerah

Urusan Perikanan

- a. Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan, adalah pemberian ijin usaha bidang perikanan, yang meliputi bidang usaha budidaya, penangkapan, perbenihan, mutu
- b. Fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan, meliputi alat tangkap ramah lingkungan
- c. Fasilitasi sarana dan sarana budidaya, meliputi demplot kolam ikan, bibit dan pakan
- d. Pembinaan/konsultasi dan pelayanan teknis kegiatan perikanan bagi pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar dan kelompok masyarakat lainnya

2. Pencapaian Kinerja pelayanan Pelayanan Dinas

- a. Kepala Dinas Pimpinan Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tersebut sebelumnya.
- b. Sekretariat Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

- 3) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 4) Menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 5) Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 6) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 7) Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap, serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja pelayanan secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, asset, akuntabilitas kinerja pelayanan dan pelaporan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 9) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 10) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pelayanan setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 11) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja pelayanan dan hasil penilaian kinerja pelayanan bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sekretariat dinas membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di

bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- c. Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan. Uraian Tugas Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan ketahanan pangan, yang meliputi program dan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
 - 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pelayanan setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan..
 - 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja pelayanan dan hasil penilaian kinerja pelayanan, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan.
 - 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dinas Pangan dan Perikanan. Bidang ini terdiri dari 2 seksi yaitu : a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

d. Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perikanan budidaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perikanan Budidaya memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perikanan budidaya, yang meliputi program dan kegiatan sarana dan prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya serta bina usaha perikanan budidaya.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang Perikanan Budidaya.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pelayanan setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Perikanan Budidaya.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja pelayanan dan hasil penilaian kinerja pelayanan, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perikanan budidaya j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dinas Pangan dan Perikanan. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Budidaya Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana, prasarana dan produksi perikanan budidaya.
 - b) Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya

Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha perikanan budidaya.

e. Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perikanan tangkap. Adapun Uraian tugasnya sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perikanan tangkap yang meliputi program dan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap.
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap. f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap serta bina usaha perikanan tangkap.
- 6) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Bidang perikanan tangkap.
- 7) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja pelayanan setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Bidang Perikanan Tangkap.
- 8) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja pelayanan dan hasil penilaian kinerja pelayanan, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perikanan tangkap.
- 9) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dinas Pangan dan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

a) Seksi Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap

Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana, prasarana dan produksi perikanan tangkap.

b) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap.

Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha perikanan tangkap.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- g. UPTD Pada tahun 2010 Balai Benih Ikan (BBI) Sungai Kambat ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala. Tujuan dan tugas pokok dari Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat sebagai salah satu UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala :
1. Menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu
 2. Menerapkan dan menyebarluaskan teknologi perbenihan kepada UPR dan pembudidaya

Daftar Pustaka

- Atep Adya Barata. (2003). Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Azwar, Saifudin. (2009). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Presetyo dan Lina Miftahul Jannah. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fandy Tjiptono. (1996). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset. _____.
- (2004). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. (2003). Total Quality Management. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. (2005). Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta: Andi Offset.
- Gaspez, Vincent. (2011). Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan Industri. Bogor: Vinchristo Publication.
- Jeni Susandari. (2012). Reformasi Birokrasi Indonesia (Studi kasus implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).
- Kasmir. (2006). Etika Customer Service. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81/KEP/M.PAN/2/1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI); Dalam Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan System Administrasi Negara.
- M. Nasution. (2005). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moenir. (2014). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Nina Rahmayanty (2013). Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2015). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudijono, Anas. (2008) Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.